

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah memiliki peranan penting dan mendasar dalam terselenggaranya pendidikan. Pendidikan yang berkualitas baik, merata dan menjamin kesejahteraan bagi masyarakatnya menjadi cita-cita dalam setiap pemerintahan. Oleh karena itu, Pemerintah sebagai pemegang pusat dalam berjalannya birokrasi salah satunya di bidang pendidikan harus mampu mewujudkan cita-cita sistem pendidikan di Indonesia yang salah satunya diatur dalam Sistem Pendidikan Nasional.¹ Masyarakat juga membutuhkan pendidikan sebagai pedoman hidup dalam menyikapi perubahan sosial yang terjadi, terutama saat ini yakni era modern dan digital. Tujuan pendidikan pada era digital yakni pendidikan dapat menjadi sarana yang mampu beradaptasi dengan teknologi informasi dan komunikasi yang ada saat ini.

Pemerintah berupaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut dengan merealisasikan pada ketetapan yang ada dalam kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan yang dibuat sebelum era digital memiliki efisiensi yang kurang dalam pelaksanaannya sehingga saat ini kebijakan diciptakan untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaannya. Efisiensi tersebut diantaranya pada aspek tata kelola, materiil, dan waktu. Namun, kebijakan pendidikan saat ini tidak menutup kemungkinan terhadap terjadinya kendala-kendala pada pelaksanaannya.

Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 pasal 11 mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi.²

¹Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003.

²*Ibid.*

Penjelasan pasal tersebut sangat jelas bahwa pemerintah memegang tanggungjawab sepenuhnya untuk menyediakan layanan pendidikan yang bermutu, transparan, dan non diskriminatif untuk setiap warganya. Pemenuhan tanggung jawab pemerintah dalam layanan pendidikan terus diperbaiki agar adanya peningkatan mutu dalam akses layanan pendidikan. Salah satu upaya yang dilakukan dengan mengevaluasi dan merapihkan sistem layanan PPDB yang sebelumnya banyak muncul permasalahan mengenai data yang tidak transparan, kurang efektif dan efisien sistem layanan, dan yang sering terjadi adanya pemalsuan nilai pendaftar agar dapat lolos dalam seleksi penerimaan sekolah yang merupakan tindakan kecurangan. Dalam temuan penelitian Jurnal Muhdi & Sapto Tahun 2012 yakni terdapat temuan mengenai tindakan kecurangan sekolah dalam membuat *gap* penilaian yang mempengaruhi hasil akhir penilaian.³ Fenomena tersebut menjadi salah satu evaluasi untuk memperbaiki layanan PPDB. Sudah tertuang dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. Bahwasanya Nilai Ujian Nasional menjadi prioritas dalam persyaratan dan proses penyeleksian PPDB.

Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut: a. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi; b. SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan c. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah.⁴

Masyarakat di wilayah DKI Jakarta baik itu orang tua maupun peserta didik masih memiliki stigma terhadap label sekolah kategori unggulan dan favorit. Hal ini menyebabkan adanya jurang pemisah antara sekolah-sekolah yang dilabelkan unggulan dengan yang non unggulan. Stigma terhadap label sekolah unggulan biasanya dikenal dengan sekolah yang memiliki eksistensi yang baik yakni SDM nya

³Muhdi dan Sapto Budoyo, Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik (PPD) Tingkat SMA/SMK di Kota Semarang Tahun 2012 (Studi Tentang SMA/SMK di Kota Semarang Tahun 2012), *Jurnal Media Penelitian Pendidikan Vol.6 No.2*, hlm 63.

⁴ Permendikbud No 14 Tahun 2018, Pasal 14.

memiliki prestasi yang baik sehingga *passing grade* yang dimiliki sekolah tersebut pun tinggi serta memiliki fasilitas yang juga sangat memadai. Oleh karena itu, ini dapat menyebabkan para calon peserta didik berlomba-lomba untuk bersaing dalam seleksi PPDB. Jika seperti ini logikanya akan menyebabkan peserta didik yang berprestasi berkumpul dalam satuan pendidikan yang berkualitas, sedangkan siswa yang tidak berprestasi berkumpul dalam satuan pendidikan yang kualitasnya jauh lebih rendah. Berangkat dari permasalahan tersebut, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengungkap pembaharuan sistem dalam PPDB yaitu dengan menerapkan kebijakan Sistem Zonasi yang juga dapat diakses secara *Online* bagi para siswa pendaftar.

Kebijakan Sistem Zonasi diatur dalam Permendikbud No.14 Tahun 2018 Pasal 2 menjelaskan bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.⁵

Sifat nondiskriminatif merupakan sifat dengan tujuan menghapuskan adanya tindakan diskriminasi dalam satuan pendidikan, seperti perbedaan kelas sosial, suku atau ras. Sifat nondiskriminatif tersebut dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu. Berbeda dengan sistem PPDB terdahulu, yang dijalankan secara luring oleh para pendaftar dan diikuti dengan adanya seleksi tes tulis dan non tulis secara ketat dan seleksi Nilai Ujian Nasional (NUN). Sistem PPDB saat ini diakses secara *online* yang dilengkapi dengan kecanggihan teknologi informasi yang ada saat ini. Pustekkom Kemdikbud sejak tahun 2009 telah mengembangkan sistem PPDB *Online* yang telah diterapkan di beberapa kabupaten/kota.⁶ Namun, sistem *online* yang ada saat ini yaitu dikenal dengan sebutan sistem RTO (*Real Time Online*) yaitu sistem yang mengambil dan

⁵Muhdi dan Sapto Budoyo, *Loc.cit*, hlm.63.

⁶Bambang Warista, Evaluasi Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran, *Jurnal Pendidikan Vol. 3 No. 1*, hlm. 28.

menyimpan data ke *database center* secara tepat waktu.⁷ Sistem RTO digunakan dalam pelaksanaan PPDB karena mempunyai nilai positif yaitu menjamin adanya transparansi dan keakuratan informasi.

Adanya kebijakan otonomi daerah pada kebijakan PPDB *Online*, maka yang diterapkan di wilayah DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Gubernur No 43 Tahun 2019 tentang PPDB yang berlaku pada tanggal 7 Mei 2019.⁸ Peraturan Gubernur tersebut dimaksudkan sebagai pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan tentang PPDB *Online* yang mengacu pada asas dan prinsip berkeadilan, objektif, akuntabel dan transparan yakni dengan menggunakan *real time online system* dan sistem zonasi. Zona yang berjalan dalam PPDB *Online* di Jakarta mengacu pada ketetapan Kepala Dinas Pendidikan.

Pergub No 43 Tahun 2019 Pasal 14 (1) Zona PPDB setiap sekolah ditetapkan oleh Kepala Dinas. (2) Dalam rangka penetapan Zona PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. Kepala Suku Dinas Pendidikan mengajukan secara tertulis permohonan penetapan Zona PPDB dilengkapi dengan data informasi jumlah, lokasi dan daya tampung sekolah disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang SD dan PKLK atau Kepala Bidang SMP dan SMA atau Kepala Bidang SMK. b. Kepala Bidang SD dan PKLK atau Kepala Bidang SMP dan SMA atau Kepala Bidang SMK memverifikasi dan memvalidasi usul permohonan penetapan Zona yang diajukan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan.⁹

Berdasarkan observasi penulis melalui website resmi PPDB *Online* Jakarta yakni <https://ppdb.jakarta.go.id> tentang jalur-jalur penerimaan. PPDB *Online* pada tahun pelajaran 2019/2020 memiliki beberapa jalur penerimaan, diantaranya jalur inklusi, jalur khusus (anak panti, pemegang kartu pekerja, dan jaklingko), jalur prestasi, jalur afirmasi (zonasi dan non zonasi), jalur zonasi, jalur non zonasi dan jalur luar DKI.¹⁰ Setiap jalur-jalur yang ada tetap dipertimbangan dengan zonasi sesuai dengan persentase daya tampung dari setiap jalurnya.

⁷Moh Imam Ardhi. Evaluasi Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Real Time Online Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan UNY Vol 8, No 1 (2015)*, hlm 81.

⁸Pergub Provinsi DKI Jakarta No 43 Tahun 2019.

⁹*Ibid.*

¹⁰Website PPDB Online, <https://ppdb.jakarta.go.id>, diakses pada 27 November 2018.

Dalam skala Nasional, zonasi menjadi konsep penting dalam program Peserta Didik Baru (PPDB) *Online* saat ini. Menurut mendikbud Muhadjir Effendy zonasi menjadi salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas dalam mengubah stigma favoritisme atau kastanisasi.¹¹ Berbeda halnya dengan pelaksanaan PPDB *Online* di wilayah DKI Jakarta. Zonasi yang ada di wilayah DKI Jakarta seperti model zonasi batas daerah, yakni batas daerah sebagai area zonasi pada lokasi sekolah untuk menentukan daerah yang termasuk dalam zona dan luar zona.¹² Zonasi yang ada di Jakarta tidak berdasarkan dengan jarak rumah ke sekolah seperti konsep zonasi di luar wilayah DKI Jakarta. Pengukuran implementasi sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB *Online* di Jakarta bukan perihal jarak domisili ke sekolah, yakni meliputi beberapa kelurahan dan kecamatan yang termasuk di dalamnya yang ada di sekitar sekolah tersebut.

“Kepala SMAN 61 Jakarta (Horale Manullang) menjelaskan ukuran penerapan sistem zonasi bukan lagi jarak domisili ke sekolah, melainkan wilayah. Untuk satu sekolah zonasinya bisa meliputi beberapa kelurahan di sekitarnya. Ada 20 kelurahan yang disepakati masuk zonasi SMAN 61. Jadi, siswa dari kelurahan-kelurahan itu yang bisa masuk jalur zonasi. Nanti KK (Kartu Keluarga) yang akan membuktikan itu.”¹³

PPDB *Online* di wilayah DKI Jakarta tetap mengutamakan aspek nilai akademis dalam penyeleksian ini. Meskipun disamping itu juga melakukan verifikasi terhadap data-data yang berkaitan dengan bukti keterangan kependudukan asli calon siswa. Ini bertujuan sebagai pengecekan domisili peserta yang mengikuti tahap jalur zonasi. Kriteria persyaratan dalam pelaksanaan PPDB *Online* tahun pelajaran 2019/2020 yakni diantaranya memiliki SKHUN SMP/SMPLB/MTs, DNUN Paket B

¹¹ Muhadjir Effendy “*Ini Alasan Kemendikbud Jalankan Sistem Zonasi*” dalam Berita Edukasi Kompas, <https://edukasi.kompas.com/read/2018/06/05/22040311/ini-alasan-kemendikbud-jalankan-sistem-zonasi> ,diakses pada 24 Juni 2020.

¹²*Ibid.*

¹³Horale Manullang “*PPDB 2019 Sistem Zonasi di Jakarta Tak Berdasarkan Jarak Rumah Kesekolah*” dalam Berita JPNN, <https://www.jpnn.com/news/ppdb-2019-sistem-zonasi-di-jakarta-tak-berdasar-jarak-rumah-ke-sekolah>, diakses pada 24 Juni 2020.

atau SKYBS, berusia paling tinggi 21 tahun dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta Kartu Keluarga (KK).¹⁴

1.2 Permasalahan Penelitian

Pemerintah membuat kebijakan pendidikan yang direalisasikan dalam program PPDB *Online* sebagai upaya dalam meminimalisir terjadinya diskriminasi sosial yang ada di sekolah. Pemerintah membuat sistem zonasi pada program tersebut yakni penerimaan berdasarkan jarak terdekat zona tempat tinggal dengan sekolah yang dapat dibuktikan melalui Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Namun, berbeda dengan konsep zonasi yang dipakai di wilayah DKI Jakarta yakni zonasi yang digunakan bukan zonasi murni seperti yang diterapkan oleh sekolah-sekolah Negeri di wilayah luar DKI Jakarta. Sistem zonasi yang dipakai di wilayah DKI Jakarta cukup menarik diperbincangkan karena berbeda konsepnya dengan sistem zonasi yang lainnya. Selain itu, prioritas Nilai Ujian Nasional (NUN) masih menjadi ukuran pencapaian yang kuat dalam penyeleksian yang ada di sekolah-sekolah Negeri di wilayah DKI Jakarta.

Fokus penulis dalam melakukan penelitian di salah satu SMA Negeri Jakarta Selatan, yaitu SMA Negeri 32 Jakarta. SMA Negeri 32 Jakarta menjadi locus penelitian penulis dikarenakan penulis tertarik untuk mengetahui secara mendalam mengenai implementasi dan dampak-dampak sosial ekonomi pada penerapan PPDB *Online*. Selain itu, mengkaji kesesuaian penerapan kebijakan pendidikan dengan peraturan pemerintah yang berlaku pada PPDB *Online* pada tahun pelajaran 2019/2020. Oleh karena itu, penulis ingin membatasi permasalahan penelitian dengan tujuan agar pembahasan yang dilakukan oleh penulis dapat lebih fokus dan mempermudah dalam penulisan. Adapun pertanyaan penelitian penulis diantaranya sebagai berikut:

¹⁴Website PPDB Online, <https://ppdb.jakarta.go.id>, diakses pada 24 Juni 2020.

1. Bagaimana implementasi PPDB *Online* di SMA Negeri 32 Jakarta tahun pelajaran 2019/2020?
2. Bagaimana dampak-dampak sosial ekonomi pada penerapan PPDB *Online* di SMA Negeri 32 Jakarta tahun pelajaran 2019/2020?
3. Bagaimana kebijakan pendidikan pada implementasi PPDB *Online* di SMA Negeri 32 Jakarta tahun pelajaran 2019/2020 dikaji dengan Pergub yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah penelitian, maka tujuan utama dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan implementasi PPDB *Online* di SMA Negeri 32 Jakarta Selatan tahun pelajaran 2019/2020.
2. Menguraikan dampak-dampak sosial ekonomi pada penerapan PPDB *Online* di SMA Negeri 32 Jakarta tahun pelajaran 2019/2020.
3. Menguraikan kebijakan pendidikan pada implementasi PPDB *Online* di SMA Negeri 32 Jakarta tahun pelajaran 2019/2020 yang dikaji dengan Pergub yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Pendidikan dalam PPDB *Online* pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di DKI Jakarta Tahun Pelajaran 2019/2020 (Studi Kasus :Program PPDB *Online* di SMA Negeri 32 Jakarta) diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Secara Akademis

Manfaat secara akademis yang diharapkan adalah hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama dengan memberikan kontribusi dan masukan dalam

kebijakan PPDB *Online* khususnya jenjang SMA/SMK/Sederajat, dapat bermanfaat dalam dunia pendidikan khususnya dalam Ilmu Manajemen Pendidikan dan Evaluasi Program Kebijakan Pemerintah dalam aspek Kebijakan Pendidikan.

1.4.2 Secara Praktis

Manfaat secara praktis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empirik mengenai Manajemen Kebijakan Pendidikan dan Evaluasi Program Kebijakan Pemerintah dalam PPDB di Tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dalam Sistem *Online*.

1.5 Tinjauan Pustaka Sejenis

Penulis menggunakan beberapa bahan pustaka yang dianggap mampu membantu proses penelitian yang berkaitan dengan objek dan subjek penelitian. Penelitian sejenis yang diambil disini merupakan penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yakni referensi mengenai Implementasi Kebijakan, Implementasi Kebijakan PPDB *Online*.. Berikut ini adalah beberapa tinjauan pustaka yang diambil dari beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yang dalam hal ini dapat membantu proses penelitian yang nantinya akan dilakukan oleh penulis.

Penelitian Pertama, ditulis oleh Hermin Aprilia dalam bentuk Jurnal Penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Vol 6 No 5 dengan judul *Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017*.¹⁵ Dalam penelitian Hermin Aprilia menggunakan konsep implementasi kebijakan dan model implementasi Van Meter &

¹⁵ Hermin Aprilia, Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017 (Studi Tentang SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017), *Jurnal Penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Vol 6 No 5*, hlm 1.

Van Horn. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Locus penelitian Hermin Aprilia yakni di SMA Negeri 4 Madiun, sekolah ini merupakan satu-satunya sekolah di Kota Madiun yang kekurangan anggaran. Tahun 2017 menjadi awal dalam penerapan PPDB *Online* berbasis zonasi. Di Madiun sistem zonasi yang diterapkan yaitu zonasi murni yang mengharuskan sekolah menerima semua jenis calon peserta didik yang mendaftar sesuai dengan zonasinya tanpa pengecualiaan. Jadi, calon peserta didik hanya bisa memilih dan diterima di sekolah Negeri yang dekat dengan radius zona tempat tinggalnya berdasarkan catatan di Kartu Keluarga (KK). Dengan demikian dapat meminimalisir siswa pintar terkumpul di satu sekolah yang selama ini disebut sebagai sekolah favorit.¹⁶

Sebagai tahun awal penerapan PPDB *Online* berbasis zonasi di Kota Madiun ini, Hermin Aprilia mengkaji implementasi yang berjalan di SMA Negeri 4 Madiun dengan model Van Meter & Van Horn dengan enam variabelnya yang menyatakan bahwa (1) Variabel ukuran dan tujuan kebijakan berjalan lancar dan baik yaitu sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, (2) Variabel sumber daya, yaitu sumber daya manusia (SDM) telah terlibat sesuai tugasnya masing-masing, sumber daya finansial berasal dari anggaran pihak sekolah, sarana dan fasilitas terkait pelaksanaan sudah disediakan oleh pihak sekolah, sumber daya waktu pelaksanaan sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, namun terdapat kurangnya waktu untuk sosialisasi terkait sistem zonasi yang akan memengaruhi kesiapan calon peserta didik dan wali murid, (3) Variabel karakteristik agen pelaksana yaitu pihak sekolah dan dinas pendidikan juga telah menaati aturan, mendukung dan menjalankan segala ketentuan dalam pelaksanaan PPDB, (4) Variabel sikap/kecenderungan disposition yaitu pihak SMAN 4 Madiun dan pihak cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun bertanggungjawab terhadap setiap tugas yang dilaksanakan, meskipun dari pihak siswa dan wali murid tidak mendukung kebijakan PPDB pada sistem zonasi pada

¹⁶*Ibid*, hlm 3.

tahun ini (2017), (5) Variabel komunikasi antarorganisasi dan aktivis pelaksana yaitu pada pelaksanaan PPDB di SMAN 4 Madiun tidak terdapat kendala dalam berkomunikasi dan koordinasi dengan pihak pelaksana yang terlibat, namun perlu adanya pemaksimalan sosialisasi PPDB melalui sekolah tingkat SMP, (6) Variabel kondisi ekonomi, sosial dan politik yaitu adanya hambatan dalam kondisi sosial seperti pelaksanaan PPDB kurang mendapat respon berupa dukungan terhadap sistem zonasi pada tahun ini (2017) kemudian, SMAN 4 Madiun juga tidak termasuk golongan sekolah favorit.

Dalam kondisi politik berupa kebijakan sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB yang tidak menentu atau berubah-ubah, selain itu kebijakan pelaksanaan PPDB terkait zonasi juga dirasa terlalu terburu-buru yang membuat orang tua belum siap dalam menerima kebijakan tersebut. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Hermin Aprilia dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu penelitian Hermin menekankan penerapan serta evaluasi sistem zonasi dalam PPDB *Online* di wilayah luar DKI Jakarta. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis dilatarbelakangi untuk melihat penerapan PPDB *Online* di wilayah DKI Jakarta yang tidak memakai sistem zonasi murni.

Penelitian Kedua, ditulis oleh Basofi Sopiarno dalam bentuk Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan UNY Vol 2, No 1 yang berjudul *Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tingkat Sekolah Menengah Atas Di Kota Pekanbaru Tahun 2011-2013*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan konseptual implementasi kebijakan dan kebijakan publik. Penelitian Basofi Sopiarno yang dilakukan di SMA Pekanbaru mengarah pada penerapan PPDB sebelum adanya sistem zonasi, namun sudah dengan sistem *online*. Sumberdaya keuangan dalam penerapan PPDB *Online* menjadi salah satu hal yang juga mendukung pelaksanaan. Penelitian Basofi menunjukkan bahwa adanya anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB) Kota Pekanbaru. Hal lainnya yang mendukung pelaksanaan yakni komitmen antara para pihak-pihak yang

terkait, yaitu Dinas Pendidikan Pekanbaru dengan pihak sekolah. Kemudian, adanya *Standard Operating Procedure (SOP)* dalam pelaksanaan PPDB *Online* oleh Dinas Pendidikan yaitu berdasarkan Perwako (Peraturan Walikota) Pekanbaru yaitu tentang pedoman PPDB pada TK, SD, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SMK Negeri/ Swasta dan *real time online system* untuk SMP/SMA Negeri Kota Pekanbaru Tahun Pelajaran 2011/2013.¹⁷

Persamaan penelitian Basofi dengan penelitian penulis yaitu memiliki kajian konseptual sejenis yakni pada implementasi kebijakan. Perbedaan penelitian Basofi Sopiarno dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu penelitian Basofi memiliki unit analisis pada implementasi PPDB secara *online* namun belum berjalannya kebijakan sistem zonasi di tahun itu. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu penerapan kebijakan PPDB secara *online* setelah berjalannya kebijakan sistem zonasi.

Penelitian Ketiga, ditulis oleh Nur Khalis dalam bentuk Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol.11 No.2 dengan judul *Akuntabilitas Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Perspektif Islam*. Unit analisis dan lokus penelitian Nur Khalis yaitu pada penyelenggaraan pendidikan. Penelitian Nur Khalis merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Konsep yang dibahas dalam penelitian Nur Khalis yaitu akuntabilitas, penyelenggaraan pendidikan, pendidikan islam.

Temuan analisis dalam penelitian Nur Khalis yaitu penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi prinsip akuntabilitas yang didasari oleh ketulusan dan dimotori oleh semangat, kebersamaan, kedisiplinan dan pengabdian yang tinggi, tentu akan membawa lembaga pendidikan ke arah yang lebih baik, sehingga tumbuh dan berkembang menjadi lembaga pendidikan yang akuntabel. Persamaan penelitian

¹⁷Basofi Sopiarno, Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tingkat Sekolah Menengah Atas Di Kota Pekanbaru Tahun 2011-2013 (Studi Tentang Program PPDB di SMA Pekanbaru), *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan UMY Vol.2 No.1*, hlm 8.

penulis dengan penelitian Nur Khalis yaitu tentang bagaimana sebuah kebijakan yang diturunkan oleh penyelenggara pendidikan dipertanggung jawabkan dengan baik. Kemudian, perbedaan penelitian Nur Khalis dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah dalam unit analisis atau studi kasus implementasi kebijakan yang diteliti. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu pada analisis implementasi kebijakan pendidikan.

Penelitian keempat, ditulis oleh Maryono dalam bentuk Jurnal Paramurobi ISSN: 2615-5680Vol.1 No.1 dengan judul *Akuntabilitas Sekolah Suatu Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah*. Unit analisis penelitian Maryono yakni pada penerapan akuntabilitas sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. Metode yang digunakan yaitu kualitatif pendekatan deskriptif dengan konseptual tentang akuntabilitas pendidikan dan mutu pendidikan. Penelitian Maryono mengarah pada penerapan sistem akuntabilitas yang dimaknai sebagai sebuah pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan di madrasah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang ditunjukkan kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*). Kemudian, dengan penerapan akuntabilitas di dalam madrasah ini, menunjukkan bahwa reputasi madrasah akan meningkat sebagai penyedia pendidikan berkualitas dan mematahkan asumsi bahwa madrasah merupakan pendidikan *second class*. Persamaan penelitian Maryono dengan penelitian penulis yaitu menggunakan konseptual yang sama yakni akuntabilitas pendidikan di sekolah. Perbedaan penelitian Maryono dengan penelitian penulis yakni penelitian Maryono memakai akuntabilitas pendidikan untuk melihat bagaimana akuntabilitas pendidikan dapat meningkatkan mutu pendidikan di madrasah, sedangkan penelitian penulis sebatas melihat bagaimana sebuah kebijakan yang diturunkan dari penyelenggara pendidikan diterapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik di sekolah.

Penelitian kelima, ditulis oleh Dr.Arwildayanto, M.Pd , dkk dalam bentuk buku oleh penerbit Cendikia Press tahun 2018 dengan judul *Analisis Kebijakan*

Pendidikan: Kajian Teoritis, Eksploratif dan Aplikatif. Buku ini menjelaskan konsep tentang kebijakan pendidikan dan implementasi kebijakan pendidikan menggunakan metode studi pustaka. Dalam bukunya Dr.Arwildayanto, M.Pd dkk, penulis mengambil bagian Bab IV yaitu Implementasi Kebijakan Pendidikan. Membahas mengenai pengertian, tahapan, model, pendekatan hingga faktor-faktor penentu dalam implementasi kebijakan pendidikan.

Dalam buku tersebut menjelaskan Implementasi kebijakan pendidikan merupakan suatu proses penyelesaian masalah pendidikan untuk mewujudkan *policy goals* dengan melewati suatu proses (*delivery mechanism*) yang sesuai dengan prosedur dan *policy outcomes* (menikmati hasil kebijakan) yang dapat dinikmati bagi seluruh stakeholder pendidikan untuk meningkatkan kepatuhan dan ketertiban administrasi. Tujuan implementasi kebijakan pendidikan diformulasikan ke dalam program aksi yang dirancang dan dibiayai serta program dilaksanakan sesuai dengan rencana. Suatu implementasi kebijakan pendidikan agar dapat mencapai tujuan dengan baik maka harus diperhatikan isi kebijakannya dan konteks implementasinya.¹⁸

Diantara isi kebijakan yakni: (1) *interest affected* yaitu kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan (2) *type of benefit* yaitu berbagai tipe manfaat yang akan dihasilkan (3) *extend of change envision* yaitu derajat perubahan yang diinginkan (4) *site of decision making* yaitu kedudukan pembuat kebijakan (5) *program implementor* yaitu pelaksana program yang harus didukung pelaksana yang kompeten (6) *resources commited* yaitu sumber daya yang bisa dikerahkan untuk melaksanakan kebijakan. Selain itu, konteks implementasi yang terdiri dari: (1) *power and strategy of actor involved* yaitu kekuasaan, kepentingan dan strategi dari para aktor yang terlibat (2) *institution an regime characteristic* yaitu karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa sebagai lingkungan implementasi kebijakan dijalankan (3)

¹⁸Dr.Arwildayanto, M.Pd dkk, *Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoritis, Eksploratif dan Aplikatif*, (Bandung: Cendikia Press, 2018), hlm 81.

compliance and responsiveness yaitu tingkat kepatuhan dan respon pelaksana menanggapi implementasi kebijakan.

Selain itu, buku tersebut membahas mengenai tahapan-tahapan yang ada dalam implementasi kebijakan pendidikan mengadaptasi pemikiran Charles O Jones dalam Gaffar (1997) yakni memiliki tahapan utama di antaranya: (1) *organization* yaitu aktivitas implementasi kebijakan pendidikan diawali dengan pengorganisasian (*organization*) sebagai upaya menetapkan dan menata sumber daya (*resources*), *unit* (*units*), dan metode (*methods*) mengarah pada upaya mewujudkan atau merealisasikan kebijakan pendidikan menjadi hasil (*outcome*) sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan pendidikan (2) *interpretation* yaitu penjelasan substansi dari kebijakan pendidikan dalam bahasa lebih operasional, mudah dipahami, dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan pendidikan itu sendiri. Tahap Interpretasi disini menjabarkan dan menerjemahkan kebijakan pendidikan yang masih berbentuk abstrak menjadi rumusan, sifatnya teknis dan operasional. Hasil interpretasi seringkali keluarannya berbentuk petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis (3) *application* yaitu tahapan aktivitas pelaksanaan atau penyediaan layanan secara rutin sesuai tujuan dan sasaran kebijakan yang ada. Tahapan aplikasi ini sering juga disebut sebagai tahapan penerapan rencana implementasi kebijakan pendidikan ke kelompok target atau sasaran kebijakan pendidikan.

Model yang efektif dalam implementasi kebijakan pendidikan yakni: (1) model linier yaitu implementasi kebijakan merupakan fase pengambilan keputusan penting, sedangkan fase pelaksanaan kebijakan sering kurang mendapat perhatian karena dianggap sebagai tanggung jawab pihak lainnya dan (2) model interaktif yaitu proses dinamis, karena setiap pihak terlibat dalam implementasi kebijakan bisa mengusulkan perubahan dalam berbagai tahapan pelaksanaan. Beberapa faktor penentu implementasi kebijakan pendidikan yakni: (1) komunikasi (2) sumberdaya (3) disposisi (4) struktur birokrasi. Kegagalan implementasi analisis kebijakan

pendidikan dapat disebabkan dengan: (1) tidak dapat diimplementasikan (2) *unsuccessfull implementation* (3) *bad policy* (terjadi *implementation gap*) (4) *bad luck*.

Pendekatan dalam implementasi kebijakan pendidikan yakni: (1) *top down* yaitu kebijakan yang bersifat strategis dan berhubungan dengan keselamatan negara, seperti kebijakan anti terorisme, radikalisme, kurikulum pendidikan, pembiayaan pendidikan nasional dan lainnya (3) *bottom up* yaitu pendekatan yang berasal dari bawah (masyarakat), didasarkan pada proses kebijakan yang bersumber dari penyampaian aspirasi masyarakat lapisan bawah, berupa permintaan ataupun dukungan seperti kebijakan yang berkaitan dengan *national security* yakni kebijakan alat kontrasepsi, padi varietas unggul, pengembangan ekonomi nelayan dan sejenisnya, sifatnya pada area tertentu dan bidang yang tidak vital (3) *mixing top down and bottom up* yaitu perpaduan kedua kebijakan ini dan dianggap efektif karena dapat menjadi kebijakan yang partisipatif. Persamaan buku Dr.Arwildayanto, M.Pd dkk dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas konseptual secara deskriptif tentang implementasi kebijakan pendidikan. Sedangkan perbedaannya yaitu buku Dr.Arwildayanto, M.Pd dkk ini membahas unit analisis penelitian pada program FDS (*Full Day School*).

Penelitian keenam, ditulis oleh Michael W. Apple, Stephen J. Ball, dan Luis Armando Gandin dalam bentuk buku dalam judul *The Routledge International Handbook of the Sociology of Education*. Buku ini menjelaskan mengenai peran kebijakan pendidikan yang ada di perkotaan yakni di AS dan Inggris. Dalam buku Stephen, dkk, penulis mengambil bagian pembahasan Bab II salah satunya tentang Pendidikan dan Hak Atas Kota Persimpangan : Antara Kebijakan Perkotaan, Pendidikan dan Kemiskinan. Dalam buku tersebut menjelaskan kebijakan pendidikan, kemiskinan dan perkotaan tidak hanya dibentuk oleh neoliberal urbanisme tetapi dapat dibentuk juga dari peningkatan ketidaksetaraan ekonomi, sosial dan spasial. Perkotaan juga dikatakan sebagai ekspresi dari dinamika ketimpangan ekstrim,

marginalitas dan sentralitas yang menjadi ciri dari ekonomi global. Perkotaan di AS dan Inggris pernah menganut paradigma neoliberal urbanisme ini yakni paradigma politik dan ekonomi yang berfokus pada strategi akumulasi modal atau kapital. Paradigma tersebut mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang ada di perkotaan yakni pada perpindahan penduduk yang menyebabkan geografi menjadi sentralitas sehingga terciptanya marginalitas baru. Adanya restrukturasi perkotaan yakni dengan menghancurkan ruang-ruang di perkotaan untuk dibangun ruang baru tujuannya untuk membangun jaringan sosial yang baru. Selain itu juga membuat restrukturasi kebijakan pendidikan yakni terciptanya sekolah-sekolah pilihan untuk elit yang juga menyebabkan ketimpangan masyarakat. Keseluruhan hal tersebut dilakukan untuk mencapai akumulasi modal di perkotaan serta untuk mereproduksi kekuasaan dan kelas melalui arena pendidikan.

Chicago menjadi contoh yang dapat ditiru selama tiga dekade terakhir dari sistem pendidikan perkotaan yakni penghapusan diferensiasi dan stratifikasi yang banyak terjadi di kota-kota di Amerika. Chicago memberikan menu insentif bagi kaum kelas atas yang digunakan untuk pengembangan perkebunan, kepentingan perusahaan, perbankan, privatisasi lembaga publik, pemasaran ke kelas menengah dan investor, serta peningkatan kepolisian dan pengawasan komunitas warna (selain kulit putih). Selain itu, pentingnya pendidikan untuk daya saing antar kota dapat diukur dengan keterlibatan elit perusahaan dan keuangan dalam kebijakan sekolah perkotaan. Chicago juga memberikan contoh yang dapat ditiru oleh kota lainnya adanya Klub Komersial Chicago (CCC) yaitu sebuah organisasi yang terdiri dari CEO dan elit sipil terkemuka yang berperan dalam kebijakan sekolah. Persamaan buku ini dengan penelitian penulis yakni membahas secara sosiologis kajian kebijakan pendidikan di perkotaan. Sedangkan, perbedaannya yakni buku ini lebih membahas mengenai kebijakan pendidikan yang dipengaruhi oleh kaum elit untuk kepentingan akumulasi kapital.

Penelitian ketujuh, ditulis oleh Mujiono dalam bentuk Jurnal Ekologi Ilmu Manajemen ISSN: 2355-6099 Vol.4 No.2 dalam judul *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*. Unit analisis dalam jurnal Mujiono yaitu pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 4 Banjar. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan konseptual tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana. Penelitian Mujiono menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS sudah berjalan cukup baik yaitu adanya kesesuaian aturan dan petunjuk teknis penggunaan dan pelaksanaan dana BOS dengan realisasinya. Kemudian, adanya pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS kepada pihak sekolah, Disdik Kota Banjar dan Disdik Provinsi Jawa Barat. Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS tersebut merupakan bentuk dari penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana.

Persamaan penelitian Mujiono dengan penelitian penulis yaitu pada penggunaan konseptual yang sejenis yakni akuntabilitas. Selain itu, penelitian Mujiono mengarah pada bagaimana suatu kebijakan diterapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Perbedaan penelitian Mujiono dengan penelitian penulis terletak pada unit analisis penelitian yakni Mujiono pada pengelolaan dana BOS di sekolah jenjang SMP sedangkan penulis pada program PPDB *Online* di sekolah jenjang SMA.

Penelitian kedelapan, ditulis oleh Afroh Nailil Hikmah dan Agus Yudiawan dalam bentuk Jurnal Pendidikan Islam Vol.5 No.1 dengan judul *Manajemen dan Kebijakan Madrasah Melalui Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Citra Publik Pendidikan*. Metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan menggunakan konseptual akuntabilitas pendidikan. Penelitian Afroh dan Agus mengarah pada kajian pustaka terkait proses perencanaan pembangunan pendidikan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk citra publik pendidikan yakni dengan sistem tata kelola dan akuntabilitas. Dalam jurnal penelitian

Afroh dan Agus terdapat salah satu hal untuk penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik madrasah yaitu dengan meningkatkan mutu laporan dan pertanggungjawaban para pengelola pendidikan secara transparan dan dapat dipercaya terhadap pelaksanaan pendidikannya. Menciptakan sekolah yang memiliki tata kelola, akuntabilitas dan citra publik madrasah yang ideal dapat dilakukan dengan (1) otonomisasi dan desentralisasi, (2) manajemen berbasis sekolah, (3) manajemen berbasis masyarakat.

Hal yang dapat dilakukan dalam peningkatan citra publik madrasah yaitu (1) analisis kebutuhan sosial yang ada di masyarakat, (2) pendekatan kebutuhan ketenagakerjaan, (3) pelayanan sekolah, dan (4) daya tarik fisik madrasah. Persamaan penelitian Afroh dan Agus dengan penelitian penulis yaitu pada penggunaan konseptual sejenis yaitu akuntabilitas pendidikan. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Afroh dan Agus yaitu pada unit analisis yang mengarah pada bagaimana penguatan dalam tata kelola dan akuntabilitas madrasah dalam citra publik pendidikan. Sedangkan dalam penelitian penulis mengarah pada bagaimana sebuah kebijakan yang direalisasikan dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

Penelitian kesembilan, ditulis oleh Rahmi Juwita, dkk dalam bentuk Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan ISSN 2622-1748 Vol.3 No.1 Tahun 2020 dengan judul *Meta Analisis: Perkembangan Teori Struktural Fungsional dalam Sosiologi Pendidikan*. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan kajian pustaka dan konseptual mengenai teori struktural fungsional. Jurnal penelitian Rahmi Juwita, dkk menjelaskan secara garis besar mengenai teori struktural fungsional terutama dalam sosiologi pendidikan. Menurut teori struktural fungsional, struktur memengaruhi tindakan sosial aktor dan tindakan sosial juga dapat memengaruhi struktur dalam mempertahankan keseimbangan sistem dalam masyarakat. Struktural fungsional memandang bahwa masyarakat merupakan sistem yang terdiri dari elemen-elemen yang saling terintegrasi, jika bagian tersebut berjalan secara terstruktur maka dapat dinyatakan fungsional, namun jika tidak maka

dapat dinyatakan tidak fungsional. Pendidikan dalam teori struktural fungsional merupakan suatu integrasi antara pendidikan dan masyarakat, dalam hubungan ini dapat dilihat bagaimana masyarakat memengaruhi pendidikan dan juga sebaliknya bagaimana pendidikan memengaruhi masyarakat.¹⁹ Dalam teori struktural fungsional tokoh besar yang dikenal yakni Emile Durkheim, Talcott Parsons, Robert K Merton. Terdapat tiga gugusan prinsip utama dalam teori struktural fungsional yakni : (1) Prinsip integritas yaitu adanya bagian-bagian dari sistem yang saling berkorelasi, (2) Prinsip stabilitas yaitu adanya keadaan yang stabil dalam sistem sosial, (3) Prinsip konsensus yaitu adanya kesesuaian dalam persepsi seperti nilai-nilai dalam sistem sosial tersebut.

Dalam jurnal Rahmi, menjelaskan secara umum mengenai analisis teori struktural fungsional terhadap kontribusinya dalam memelihara dan mempertahankan sistem sosial dalam lembaga pendidikan. Terdapat pemikiran Durkheim yang dijabarkan dalam tiga kategori diantaranya: (1) Pendidikan dan solidaritas sosial yakni adanya transmisi nilai dan norma sosial dalam masyarakat, (2) Sekolah sebagai miniatur dalam masyarakat yaitu sekolah menyiapkan pengalaman untuk berinteraksi dengan masyarakat, (3) Pendidikan dan pembagian kerja yaitu pendidikan memiliki fungsi dalam memberikan keterampilan khusus untuk terjun dalam spesialisasi pekerjaan yang semakin kompleks. Terdapat juga pemikiran Talcott Parsons dijabarkan dalam tiga kategori diantaranya: (1) Pendidikan dan nilai universal yaitu sekolah mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai yang bersifat universal kepada peserta didik agar nantinya dapat diterima di masyarakat, (2) Pendidikan dan kesepakatan nilai yaitu pendidikan mengajarkan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat, (3) Pendidikan dan seleksi sosial.²⁰ Persamaan penelitian dalam jurnal Rahmi Juwita, dkk dengan penelitian penulis yaitu membahas kajian teori struktural fungsional dalam sosiologi pendidikan. Kemudian, perbedaannya terletak pada kajian

¹⁹ Rahmi Juwita, dkk, Meta Analisis: Perkembangan Teori Struktural Fungsional dalam Sosiologi Pendidikan, *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan Vol.3 No.1 Tahun 2020*, hlm.5.

²⁰ *Ibid*, hlm.6.

yang dikaji dalam jurnal Rahmi Juwita, dkk membahas secara deskriptif mengenai perkembangan teori struktural fungsional dari beberapa tokoh sosiolog. Sedangkan, penelitian penulis menganalisis studi kasus dengan teori struktural fungsional dalam sosiologi pendidikan.

Tabel I.1
Perbandingan Tinjauan Pustaka Sejenis

No	Peneliti	Jenis dan Tahun Publikasi	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Hermin Aprilia	Jurnal Nasional (Jurnal Penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Vol.6 No.5), 2018	Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017	Menjelaskan tentang implementasi program PPDB di SMA	Penelitian yang dilakukan oleh Hermin Aprilia dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu penelitian Hermin menekankan penerapan serta evaluasi sistem zonasi dalam PPDB <i>Online</i> di wilayah luar DKI Jakarta. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis dilatarbelakangi untuk melihat penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) <i>Online</i> di wilayah DKI Jakarta yang tidak memakai sistem zonasi murni.
2	Basofi Sopiatio	Jurnal Nasional (Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan UNY Vol. 2 No. 1), 2015	Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tingkat Sekolah Menengah Atas Di Kota Pekanbaru Tahun 2011-2013 (Studi Tentang Program PPDB di SMA Pekanbaru	Memiliki kajian konseptual sejenis pada yakni implementasi kebijakan.	Perbedaan penelitian Basofi Sopiatio dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu penelitian Basofi memiliki unit analisis pada implementasi PPDB secara <i>online</i> namun belum berjalannya kebijakan sistem zonasi di tahun itu. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu penerapan kebijakan

					PPDB secara <i>online</i> setelah berjalannya kebijakan sistem zonasi.
3	Nur Khalis	Jurnal Nasional (Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol.11 No.2), 2018	Akuntabilitas Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Perspektif Islam	Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Nur Khalis yaitu bagaimana sebuah kebijakan yang diturunkan oleh penyelenggara pendidikan dipertanggung jawabkan dengan baik.	Perbedaan penelitian Nur Khalis dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah dalam unit analisis atau studi kasus implementasi kebijakan yang diteliti. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu pada analisis implementasi kebijakan pendidikan.
4	Maryono	Jurnal Internasional (Jurnal Paramurobi Vol.1 No.1ISSN: 2615-5680), 2018	Akuntabilitas Sekolah Suatu Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah	Persamaan penelitian Maryono dengan penelitian penulis yaitu menggunakan konseptual yang sama yakni akuntabilitas pendidikan di sekolah.	Perbedaan penelitian Maryono dengan penelitian penulis yakni penelitian Maryono memakai akuntabilitas pendidikan untuk melihat bagaimana akuntabilitas pendidikan dapat meningkatkan mutu pendidikan di madrasah, sedangkan penelitian penulis sebatas melihat bagaimana sebuah kebijakan yang diturunkan dari penyelenggara pendidikan diterapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik di sekolah.
5	Dr.Arwildayanto, M.Pd, dkk	Buku Elektronik (Cendikia Press), 2018	Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoritis, Eksploratif dan Aplikatif	Persamaan buku Dr.Arwildayanto, M.Pd dkk dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas konseptual secara deskriptif tentang implementasi kebijakan pendidikan	Perbedaannya yaitu buku Dr.Arwildayanto, M.Pd dkk ini membahas unit analisis penelitian pada program FDS (<i>Full Day School</i>)
6	Michael W. Apple, Stephen J. Ball, Luis Armando Gandin	Buku Elektronik (Routledge Taylor & Francis Group), 2010	<i>The Routledge International Handbook of the Sociology of Education</i>	Persamaan buku ini dengan penelitian penulis yaitu membahas kajian teori sosiologi pendidikan	Perbedaannya yaitu buku ini lebih menjelaskan kebijakan pendidikan di perkotaan yang dipengaruhi oleh

				pada kebijakan pendidikan perkotaan di	kaum elit untuk kepentingan akumulasi kapital
7	Mujiono	Jurnal Internasional (Jurnal Ekologi Ilmu Manajemen Vol.4 No.2 ISSN: 2355-6099), 2017	Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Persamaannya pada konseptual akuntabilitas dan mengarah pada bagaimana suatu kebijakan diterapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik	Perbedaannya yakni pada unit analisis, yaitu pengelolaan dana BOS di jenjang SMP sedangkan penulis pada program PPDB <i>Online</i> di jenjang SMA
8	Afroh Nailil Hikmah dan Agus Yudiawan	Jurnal Nasional (Jurnal Pendidikan Islam Vol.5 No.1), 2019	Manajemen dan Kebijakan Madrasah Melalui Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Citra Publik Pendidikan	Persamaan penelitian Afroh dan Agus dengan penelitian penulis yaitu pada penggunaan konseptual sejenis yaitu akuntabilitas pendidikan	Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Afroh dan Agus yaitu pada unit analisis yang mengarah pada bagaimana penguatan dalam tata kelola dan akuntabilitas madrasah dalam citra publik pendidikan. Sedangkan dalam penelitian penulis mengarah pada bagaimana sebuah kebijakan yang direalisasikan dan dipertanggungjawabkan dengan baik
9	Rahmi Juwita, dkk	Jurnal Nasional (Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan Vol.3 ISSN: 2622-1748), 2020	Meta Analisis: Perkembangan Teori Struktural Fungsional dalam Sosiologi Pendidikan	Persamaan penelitian dalam jurnal Rahmi Juwita, dkk dengan penelitian penulis yaitu membahas kajian teori struktural fungsional dalam sosiologi pendidikan.	Perbedaannya terletak pada kajian yang dikaji dalam jurnal Rahmi Juwita, dkk membahas secara deskriptif mengenai perkembangan teori struktural fungsional dari beberapa tokoh sosiolog. Sedangkan, penelitian penulis menganalisis studi kasus dengan teori struktural fungsional dalam sosiologi pendidikan.

(Sumber: Diolah oleh Penulis, 2020)

1.6 Kerangka Konseptual

Penelitian ini berusaha menggali implementasi kebijakan pendidikan yang berjalan dalam penyelenggaraan PPDB secara *online* di jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) pada tahun pelajaran 2019/2020. Keberagaman opini yang tersaji dalam ruang publik menarik untuk didalami maksud dan tujuan dari implementasi kebijakan tersebut. Untuk mendukung penelitian ini, konsep-konsep dibawah dilihat sebagai alat yang akan dielaborasi untuk kemudian menjadi bagian dari analisis penulis tentang implementasi kebijakan pendidikan yang berjalan dalam proses PPDB *Online* di jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Jakarta Selatan.

1.6.1 Implementasi Kebijakan Publik

Dalam perencanaan sebuah program sering kali melihat adanya istilah implementasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi memiliki arti pelaksanaan dan penerapan.²¹ Implementasi merupakan pelaksanaan dari sebuah program atau kegiatan yang sudah dirancang. Implementasi juga menjadi salah satu tahapan yang ada dalam berjalannya sebuah kebijakan. Grindle mengatakan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah disalurkan untuk mencapai sasaran.²²

Hough (1984) sebagaimana dikutip oleh Mudjia Rahardjo juga menegaskan sejumlah arti kebijakan. Kebijakan bias menunjuk pada seperangkat tujuan, rencana atau usulan, program-program, keputusan-keputusan, menghadirkan sejumlah pengaruh, serta undang-undang atau peraturan-peraturan.²³

Kebijakan dalam arti di atas memiliki artian yang terstruktur dimana kebijakan sebagai sebuah keputusan yang dapat melahirkan sebuah peraturan. Kebijakan erat dikaitkan dengan pemerintahan dan publik. Oleh karena itu adanya

²¹Website Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id> diakses pada 7 November 2019.

²² Marilee S Grindle, *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*, (New Jersey:Princetown University Press, 1980), hlm 57.

²³ Mudjia Raharjo, *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm 3.

istilah kebijakan publik. Kebijakan publik menurut Bridgman dan Davis pada umumnya mengandung pengertian mengenai *'whatever government choose to do or not to do'*.²⁴ Pengertian tersebut mengandung arti bahwa apapun yang dipilih pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan.

Implementasi kebijakan dimaksudkan sebagai keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan, yaitu tindakan-tindakan yang merupakan usaha sesaat untuk mentransformasikan keputusan ke dalam istilah operasional ataupun usaha berkelanjutan untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.²⁵

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan mengandung arti pengaktualisasian program atau kebijakan berupa tindakan yang dijalankan oleh pihak-pihak yang bersangkutan yang ditentukan dalam kebijakan yang dibuat. Implementasi kebijakan merupakan tahapan proses yang dijalankan setelah kebijakan direncanakan dan disahkan. Dari beberapa pengertian tersebut, maka implementasi kebijakan publik merupakan aktualisasi atau penerapan program-program kebijakan yang telah direncanakan dan disahkan oleh pihak yang berwenang yang diberikan untuk layanan publik (masyarakat).

Menurut Van Meter dan Horn ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan, yakni : Pertama, standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran menurut kedua pakar ini harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Kedua, sumber daya, implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumberdaya manusia maupun non manusia. Ketiga, hubungan antar organisasi, dalam banyak program implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Keempat, karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. Kelima, kondisi sosial, politik dan ekonomi yang mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Keenam, disposisi implementor yang mencakup tiga hal yaitu respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahamannya terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.²⁶

²⁴Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung: Pustaka Alfabet, 2007), hlm 67.

²⁵Ahmad Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi ke Implementasi*, (Bandung: Pustaka Setia Cetakan I, 2015), hlm 132

²⁶Agustinus Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm 99.

Dalam tahapan implementasi kebijakan, adanya variabel-variabel tertentu yang menjadi tolak ukur dalam mempengaruhi implementasi kebijakan. Variabel tersebut mengacu pada struktur isi kebijakan dan agen pelaksana yang terlibat dalam kebijakan. Sebuah kebijakan publik dapat dievaluasi dari variabel-variabel tersebut menurut para ahli. Pemerintah wajib mempertimbangkan secara rasional mengenai mengapa kebijakan tersebut harus dikerjakan dan apa saja manfaat dari adanya kebijakan tersebut. Sekecil apapun ukuran kebijakan yang dibuat akan tetap memberikan dampak pada masyarakat karena adanya implementasi kebijakan yang dijalankan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus bersikap adil, andil dan bijaksana dalam penetapan suatu kebijakan publik.

1.6.2 Kebijakan Pendidikan

Dalam pembahasan mengenai kebijakan, kebijakan erat kaitannya dengan perencanaan program-program yang direncanakan dan diputuskan oleh pemerintah. Kebijakan dibuat oleh pemerintah untuk mencapai visi-misinya. Kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.²⁷ Dalam sebuah pemerintahan atau lembaga non pemerintah, kebijakan dibuat sesuai dengan aspek atau bidang sebagai sasaran tujuannya. Sebagai contoh, jika pihak pembuat kebijakan melihat dan memiliki hipotesa permasalahan dalam bidang pendidikan di Indonesia yang sebagian besar harus dibenahi dan jika pembuat kebijakan tersebut memiliki legalitas kewenangan, maka kebijakan akan terbentuk.

Pendidikan menjadi salah satu aspek atau bidang yang menjadi fokus utama dalam pembangunan sebuah Negara. Jika kualitas pendidikan berjalan dengan baik, maka Negara pun akan berkembang dengan baik karena memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kualitas yang baik. Pendidikan juga menjadi aspek yang

²⁷Syafaruddin. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*, (Jakarta: Rineka Cipta Cetakan I, 2008), hlm 75.

krusial dalam pertimbangannya untuk membuat sebuah kebijakan, karena menyangkut pembentukan karakter seseorang dalam kehidupannya. Pendidikan banyak diartikan dengan makna pengetahuan, pengajaran dan pembelajaran.

Sedangkan pendidikan yang tertera dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.²⁸

Dari pengertian tersebut, usaha sadar dan terencana yang dimaksud yaitu terjadinya proses pendidikan melalui satuan pendidikan yaitu lembaga pendidikan seperti sekolah. Pendidikan sebagai salah satu aspek yang ada di dalam SDGs (*Sustainable Development Goals*) menjadi perhatian yang kuat dalam pemerintahan suatu Negara. Salah satunya dalam pembuatan kebijakan dalam pemerintahan. Kebijakan pendidikan yang dibuat dan diputuskan pemerintah akan memberikan pengaruh di dalam setiap aspek pendidikan di semua lembaga pendidikan, baik itu lembaga di bawah naungan pemerintah ataupun lembaga swasta.

Kebijakan pendidikan berdasarkan hakikat pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu.²⁹

Kebijakan merupakan keputusan yang berisi rencana-rencana berupa program yang dibuat secara terencana untuk mencapai visi dan misi tertentu. Kebijakan pendidikan memiliki makna mengenai program-program terencana dari pemerintah untuk diimplementasikan dalam setiap lembaga pendidikan agar tercapainya tujuan dan sasaran yang diharapkan. Sebuah kebijakan pendidikan dapat berjalan baik jika adanya faktor pendukung di dalamnya. Salah satunya terdapat beberapa aspek yang tercakup dalam tercapainya kebijakan pendidikan yang diharapkan.

²⁸Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS.

²⁹H.A.R. Tilaar & Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm 140.

Aspek-aspek yang tercakup dalam kebijakan pendidikan menurut H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho diantaranya: (1) Kebijakan pendidikan merupakan suatu keseluruhan mengenai hakikat manusia sebagai makhluk yang menjadi manusia dalam lingkungan kemanusiaan, (2) Kebijakan pendidikan dilahirkan dari ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis, (3) Kebijakan pendidikan haruslah mempunyai validitas dalam perkembangan pribadi serta masyarakat yang memiliki pendidikan itu, (4) Keterbukaan, (5) Kebijakan pendidikan didukung oleh riset dan pengembangan, (6) Analisis kebijakan, (7) Kebijakan pendidikan pertama-tama ditujukan kepada peserta didik, (8) Kebijakan pendidikan diarahkan pada terbentuknya masyarakat demokratis, (9) Kebijakan pendidikan berkaitan dengan misi pendidikan dalam pencapaian tujuan-tujuan tertentu, (10) Kebijakan pendidikan harus berdasarkan efisiensi, (11) Kebijakan pendidikan bukan berdasarkan pada kekuasaan tetapi kepada kebutuhan peserta didik, (12) Kebijakan pendidikan bukan berdasarkan institusi atau kebijaksanaan yang irrasional, (13) Kejelasan tujuan akan melahirkan kebijakan pendidikan yang tepat.³⁰

Aspek-aspek yang dijabarkan tersebut mengandung makna bahwa sebuah kebijakan pendidikan harus fokus kepada sasaran dan tujuannya. Seperti halnya harus ditujukan kepada peserta didik dan masyarakat. Kemudian, tujuan kebijakan yang mengacu pada kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Selain itu, kebijakan pendidikan pun harus dibuat berdasarkan pertimbangan matang dilihat dalam kacamata pendidikan agar tercipta tujuan yang jelas dan melahirkan kebijakan yang tepat untuk masyarakat. Secara eksternal pun kebijakan pendidikan harus bersepadu dengan kebijakan lainnya seperti kebijakan politik, kebijakan moneter, bahkan kebijakan pendidikan di atasnya atau disamping dan dibawahnya.³¹

1.6.3 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh satuan lembaga pendidikan yaitu sekolah. Kegiatan tersebut diselenggarakan pada saat tahun ajaran baru di sekolah. Kegiatan PPDB berlangsung dengan adanya proses penyeleksian berdasarkan kualifikasi yang diajukan oleh sekolah-sekolah.

³⁰Arif Rohman, *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta:Laksbang Mediatama Yogyakarta, 2009), hlm 120.

³¹Ali Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia:Proses, Produk dan Masa Depan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm 20.

Standar kualifikasi peserta didik yang ditentukan oleh sekolah-sekolah memiliki keberagaman, standar kualifikasi tersebut sesuai dengan standar kualitas yang dimiliki sekolah tersebut. Peserta didik menurut UUD Nomor 20 tahun 2003 adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.³² Peserta didik sebagai sebuah *input* dan *output* dalam manajemen pendidikan di sekolah menjadi salah satu aspek penting yang dipertimbangkan dalam proses penyeleksian pada saat PPDB. Tahap penyeleksian juga menjadi salah satu bagian dari rangkaian kegiatan PPDB.

Rekrutmen atau penerimaan peserta didik baru di sebuah lembaga pendidikan (sekolah) pada hakikatnya merupakan proses pencarian, menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan (sekolah) yang bersangkutan.³³

Proses pencarian dalam makna tersebut yaitu dengan diselenggarakannya proses penyeleksian antar para pendaftar (calon peserta didik baru). Seleksi tersebut diselenggarakan berdasarkan standar kualifikasi peserta didik dan ketentuan peraturan dari sekolah yang bersangkutan. Seleksi tersebut dijalankan dengan adanya tes-tes atau ujian tertentu dapat berupa tes akademik yang terdiri dari penilaian Nilai Ujian Nasional (NUN), psikotes, ataupun tes keagamaan. Semakin tinggi standar kualitas sekolah maka akan semakin ketat penyeleksian yang berlangsung karena sekolah yang bersangkutan akan menentukan standar kualifikasi yang tinggi. Penyeleksian tersebut berguna dalam mengeksplor dan mengelaborasi kemampuan kognitif, afektif serta psikomotorik yang dimiliki calon peserta didik yang mendaftar.

Kegiatan PPDB yang dahulu berlangsung dengan cara pendaftaran langsung dengan mengunjungi sekolah-sekolah yang diminati dengan mendaftarkan diri untuk mengikuti penyeleksian ujian masuk, kini bergeser dengan adanya sistem *online*. PPDB *Online* ini sudah diterapkan hampir di seluruh Sekolah Negeri yang ada di

³²Direktorat Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI, *Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Tentang Pendidikan*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), hlm 5.

³³Tim Dosen UPI, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 205.

Indonesia. Ada sebanyak 83 daerah yang terdiri dari 13 Provinsi dan 70 Kota/Kabupaten yang sudah melaksanakan PPDB *Online* di tahun 2018.³⁴ PPDB *Online* ini diusung dengan tujuan-tujuan tertentu.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Online* merupakan kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu dalam proses entri, memakai sistem database, seleksi otomatis oleh sistem oleh program komputer dan hasil seleksi dapat diakses setiap waktu secara online.³⁵

Sistem PPDB yang dilaksanakan secara *online* ini bertujuan untuk menjamin PPDB berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, dan bersifat non diskriminatif dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan pada satuan pendidikan yaitu di sekolah-sekolah Negeri. Sistem teknologi informasi yang dipakai dalam kegiatan penerimaan peserta didik baru tersebut adalah *Real Time online* (RTO) yaitu sistem yang mengambil dan menyimpan data ke *data base center* secara tepat waktu.³⁶ Sistem ini dipakai karena mempunyai nilai positif yaitu lebih menjamin adanya transparansi dan keakuratan informasi, sistem ini *online* ini juga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pendaftaran peserta didik baru. Dalam PPDB *Online*, sistem yang digunakan bernama SIAP PPDB *Online*.

Sistem SIAP PPDB *Online* adalah sistem yang dirancang untuk melakukan otomatisasi seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi, hingga pengumuman hasil seleksi, yang memudahkan bagi Dinas/Instansi Pendidikan, Sekolah, dan Masyarakat.³⁷

Dalam sistem SIAP PPDB *Online*, memberikan layanan konsep jalur-jalur penerimaan. Jalur ini bertujuan agar terciptanya pemerataan dalam penyeleksian peserta didik baru di sekolah-sekolah. Dalam jalur-jalur ini memiliki deskripsi konsep, tujuan serta persentase kuota penerimaannya masing-masing.

³⁴Website PPDB Online, <https://ppdb.jakarta.go.id>, diakses pada 9 Februari 2019.

³⁵Afriani Rolenta Naibaho, Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tingkat Sekolah Menengah Atas di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, *Jurnal Departemen Ilmu Administrasi Publik Universitas Sumatera Utara* (2018), hlm 23.

³⁶Moh Imam Ardhi, Evaluasi Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Real Time Online Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan UNY Vol 8, No 1(2015)*, hlm 81.

³⁷Website PPDB Online, <https://ppdb.jakarta.go.id>, diakses pada 9 Februari 2019.

Tabel I.2

Konsep Jalur Penerimaan dalam Sistem SIAP PPDB Online

Jalur		
Jalur Prestasi	Jalur Zonasi	Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali
Jalur Prestasi adalah Jalur yang diperuntukan bagi para calon siswa yang memiliki prestasi dan berada di luar zonasi sekolah. Prestasi dapat digunakan sebagai penentuan seleksi, maupun pemberian nilai tambah berdasarkan jenis dan tingkat prestasinya.	Jalur Zonasi merupakan jalur untuk siswa yang memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan. Jumlah peserta didik diterima paling sedikit adalah 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan daya tampung sekolah.	Jalur Perpindahan Orang tua/Wali adalah jalur yang ditujukan pada peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan dikarenakan orang tuanya yang pindah domisili karena tugas.
Jumlah peserta didik diterima paling banyak adalah 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan daya tampung sekolah.	Model dan konsep zonasi sekolah merupakan wewenang dari masing-masing Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya. Berikut adalah beberapa konsep zonasi terdekat sekolah yang digunakan sebagai dasar seleksi pada Telkom SIAP PPDB Online adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Zonasi Tabel Jarak <ul style="list-style-type: none"> o Menentukan nilai zona berdasar pada bobot nilai yang sudah ditentukan dalam tabel. 2. Zonasi Model Batas Daerah (Kota/Kab, Kecamatan, Kelurahan, RW, RT) <ul style="list-style-type: none"> o Batas daerah sebagai area zonasi pada lokasi sekolah untuk menentukan daerah yang termasuk dalam zona dan luar zona. 3. Zonasi Radius Jarak 	Jumlah peserta didik diterima paling banyak adalah 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan daya tampung sekolah.

Jalur		
Jalur Prestasi	Jalur Zonasi	Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali
	<p>Mapping</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Menentukan zona sekolah berdasarkan radius yang sudah di otomisasi oleh sistem berdasarkan radius tempat tinggal dengan sekolah. ○ Radius pointing diset oleh operator sekolah mengacu pada titik lokasi sekolah dengan titik lokasi tempat tinggal siswa. <p>4. Zonasi Model Rayon</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Zonasi model ini digunakan untuk menentukan Sekolah-sekolah sesuai rayon yang sudah ditetapkan, agar mengurangi pengelompokan pilihan pada Sekolah Favorit. ○ Zonasi model rayon tidak terbatas berdasarkan wilayah administratif saja, tapi dapat juga disesuaikan dengan pembagian-pembagian rayon dengan kriteria tertentu. Semisal, pembagian sekolah unggulan dan tidak, dan lain sebagainya. <p>5. Zonasi Pilihan Sekolah</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Model zonasi yang dapat membatasi pilihan sekolah tujuan berdasarkan asal lulusan sekolah siswa. 	

Jalur		
Jalur Prestasi	Jalur Zonasi	Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali
<p>Contoh daerah yang menerapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkup Provinsi: Prov. Lampung, Prov. Kalimantan Timur dan Prov. Bali 2. Lingkup Kota dan Kabupaten: Kota Cimahi, Kota Makassar, Kota Dumai dan beberapa daerah lainnya 	<p>Contoh daerah yang menerapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkup Provinsi: Prov. DKI Jakarta, Prov. Jawa Tengah dan Prov. Sulawesi Selatan 2. Lingkup Kota dan Kabupaten: Kota Malang, Kota Samarinda, Kota Kupang dan beberapa daerah lainnya 	<p>Contoh daerah yang menerapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkup Provinsi: Prov. Riau dan Prov. Sulawesi Utara 2. Lingkup Kota dan Kabupaten: Kab. Kulonprogo dan Kab. Temanggung

(Sumber : Website SIAP PPDB *Online* , 2019)

1.6.4 Akuntabilitas Pendidikan

Akuntabilitas merupakan salah satu konsep yang ada dalam pendidikan. Akuntabilitas menurut KBBI memiliki arti kata dipertanggungjawabkan.³⁸ Sesuatu yang dipertanggungjawabkan disini diartikan sebagai sesuatu yang memiliki wewenang dari pihak yang membuat kewenangan tersebut. Pertanggungjawaban tersebut dapat dimaknai dengan menerangkan tindakan atau kinerja seseorang atau lembaga tertentu.

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang /badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.³⁹

Sekolah sebagai bentuk nyata dari sebuah satuan pendidikan formal yang juga memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan akuntabilitas pendidikan. Konsep akuntabilitas pendidikan bisa dimaknai sebagai pertanggungjawaban lembaga

³⁸Website Kamus Besar Bahasa Indonesia ,<https://kbbi.web.id> diakses pada 7 November 2019.

³⁹Maryono, Akuntabilitas Sekolah : Suatu Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah, *Jurnal Paramurobi Vol.1 No.1 (2018)*, hlm.33.

pendidikan (sekolah atau institusi pendidikan) dalam pencapaian tujuan pendidikan.⁴⁰ Selain itu, dalam konsep akuntabilitas pendidikan lembaga yang memiliki wewenang tersebut dituntut agar dapat memberikan transparansi kepada masyarakat yang posisinya sebagai pengguna jasa pendidikan. Transparansi tersebut dapat dimaknai sebagai perwujudan dari tanggungjawab terhadap wewenang yang diberikan.

Konsep akuntabilitas menyembul ke permukaan saat terjadi gerakan reformasi yang menuntut bahwa aparat penyelenggaraan lembaga publik harus bersih dan transparan. Akuntabilitas pendidikan pada level sekolah atau madrasah bisa dipahami sebagai suatu bentuk perwujudan rasa tanggungjawab yang mencerminkan sikap transparan pihak sekolah sebagai eksekutif ditujukan kepada publik atau masyarakat yang notabene sebagai pengguna jasa pendidikan.⁴¹

Salah satu cara untuk mewujudkan proses dan layanan pendidikan yang memiliki kualitas yang baik yaitu dengan mewujudkan sistem akuntabilitas kinerja sekolah. Kinerja sekolah dapat dipahami sebagai sebuah hasil kerja yang menjadi tanggungjawab seluruh jajaran yang ada di sekolah dan diberikan oleh publik maupun pemerintah untuk mencapai tujuan pendidikan bersama. Dalam sistem akuntabilitas kinerja sekolah, semua komponen atau aspek yang terkait dengan pengelolaan pendidikan yang meliputi input, proses dan output harus dipertanggungjawabkan secara objektif dan transparan kepada para stakeholder.⁴² Akuntabilitas pendidikan di sekolah selain memiliki tujuan agar terciptanya sekolah yang berkualitas dan terpercaya juga memiliki tujuan dalam penilaian kinerja sekolah yang juga akan berkaitan dengan kepuasan publik/masyarakat terhadap proses dan layanan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah.

Selain itu, tujuan akuntabilitas adalah menilai kinerja sekolah dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah, untuk mengikutsertakan masyarakat dalam pengawasan pelayanan pendidikan, dan untuk mempertanggungjawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada masyarakat.⁴³

⁴⁰Agus Wibowo, *Akuntabilitas Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2013), hlm 48.

⁴¹Maryono, *Loc.cit*, hlm.32.

⁴²Agus Wibowo, *Op.cit*, hlm.50.

⁴³Slamet PH, Menjadi Kepala Sekolah yang Tangguh, *Jurnal Pendidikan Jilid 3 No.5 (2000)*, hlm.12.

Dalam penerapan akuntabilitas pendidikan di dalam satuan pendidikan sekolah, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Terdapat beberapa elemen yang terlibat dalam penerapan akuntabilitas pendidikan di sekolah. Elemen tersebut diantaranya (1) Guru, yakni sebagai pendidik yang menjadi pusat dari kegiatan di sekolah, (2) Administrator Pendidikan, yaitu staff di sekolah yang mengurus perihal manajemen administrasi sekolah, (3) Siswa, yakni peserta didik sebagai sasaran dalam kegiatan pendidikan, (4) Lembaga Pendidikan, yakni suatu lembaga yang menangani dan biasanya meluruskan permasalahan yang ada dalam isu pendidikan, (5) Orang Tua, yaitu sebagai pendamping peserta didik dalam urusan terkait kegiatan di sekolah, (6) Pemerintah, yaitu sebagai sentralisasi kebijakan yang turun dan diterapkan di dalam kegiatan di sekolah. Enam elemen tersebut saling terkait satu sama lainnya dalam menjalankan akuntabilitas pendidikan di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan.

Untuk menerapkan akuntabilitas pendidikan dengan benar dibutuhkan kerjasama enam elemen yang terlibat untuknya, yaitu guru (pendidik), administrator pendidikan (staff atau karyawan), siswa (pesertadidik), lembaga pendidikan, masyarakat termasuk orang tua dan pemerintah.⁴⁴

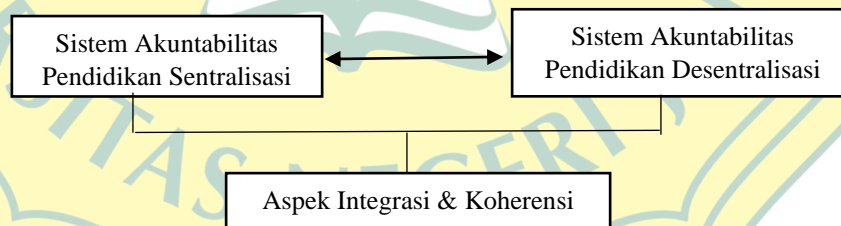
Selain itu, kajian mengenai pentingnya sistem akuntabilitas pendidikan di daerah juga menjadi bagian dari sistem akuntabilitas pendidikan di tingkat pusat. Sistem akuntabilitas pendidikan di daerah (desentralisasi) dipahami sebagai bagian yang terintegrasi dengan sistem akuntabilitas pendidikan di tingkat pusat. Integrasi ini yang membuat akuntabilitas pendidikan di tingkat daerah menjadi strategis dalam memastikan pelaksanaan pendidikan yang berjalan di sekolah berlangsung dengan efektif atau tidak dan dapat dipertanggungjawabkan (koherensi). Namun, secara teoritis maupun praktis pemerintah daerah dapat menentukan standarnya melebihi standar minimal yang ada di pemerintah pusat.

⁴⁴Nur Khalis, Akuntabilitas Penyelenggaraan Pendidikan dalam Perspektif Islam, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol.11 No.2 (2018)*, hlm.182.

Hal ini juga merupakan aspek lain dari keuntungan penerapan akuntabilitas pendidikan di tingkat daerah, yakni adanya fleksibilitas. Di satu sisi, desentralisasi membantu menangani kesulitan pemerintah pusat dalam menangani dan menerapkan akuntabilitas pendidikan terpusat (sentralisasi). Kemudian, di sisi lain ini juga menjadi keuntungan bagi pemerintah daerah dalam menerapkan akuntabilitas pendidikan di tingkat daerah dikarenakan pemerintah daerah dan sekolah yang akan memelihara dan mengembangkan sistemnya secara fleksibel yakni salah satunya dalam penentuan standar pencapaian yang dapat melebihi standar minimal dari pemerintah pusat. Penerapan sistem akuntabilitas tersebut terletak pada upaya pemerintah daerah yaitu dinas pendidikan di tingkat daerah dalam mengartikulasikan, mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi sistem akuntabilitas di daerahnya.

Menurut MacAdam, sistem akuntabilitas di daerah dipandang sebagai bagian penting (koherensi dan integrasi) dari sistem akuntabilitas tingkat negara bagian atau bahkan tingkat pusat (federal). Temuan MacAdam tersebut menekankan pentingnya integrasi sistem akuntabilitas pendidikan dari tingkat pusat hingga ke sekolah.⁴⁵

Skema I.1
Aspek-aspek Akuntabilitas Pendidikan Sentralisasi & Desentralisasi Menurut MacAdam



(Sumber: Diolah oleh Penulis, 2020)

Terdapat beberapa keuntungan dari penerapan sistem akuntabilitas di tingkat daerah menurut MacAdam, diantaranya: *Pertama*, memfokuskan pada prioritas lokal, dapat dipahami penerapan akuntabilitas ini menjadikan fokus pada prioritas yang

⁴⁵Yahya Sudarya & Tatang Suratno, Prinsip-prinsip Akuntabilitas Sekolah: Pengembangan Sistem Akuntabilitas di Dinas Pendidikan, *Jurnal UPI No.14 (2010)*, hlm.2.

menjadi bagian daerahnya. *Kedua*, lebih cermat dalam memperbaiki sistem akuntabilitasnya dalam mengukur kinerja sekolah dari berbagai bidang dan dengan berbagai cara, dapat dipahami bahwa dengan penerapan akuntabilitas di tingkat daerah dapat memperbaiki sistem akuntabilitasnya jika mengalami kekurangan dan menjadikan lebih cermat dalam mengetahui sejauh mana kinerja sekolah sudah berjalan dalam pencapaian tujuan pendidikan. *Ketiga*, menyesuaikan akuntabilitas lokal secara komparatif sebagai dasar peningkatan kinerja secara berkelanjutan, dapat dipahami bahwa dengan penerapan akuntabilitas di tingkat daerah menimbulkan adanya perbandingan dengan daerah lainnya dengan tujuan sebagai dasar peningkatan kinerja ke depannya.

MacAdam berpendapat bahwa setidaknya terdapat tiga keuntungan dari sistem akuntabilitas tingkat daerah, yaitu: 1) memfokuskan pada prioritas lokal; 2) lebih cermat dalam memperbaiki sistem akuntabilitasnya dalam mengukur kinerja sekolah dari berbagai bidang dan dengan berbagai cara; dan 3) menyesuaikan akuntabilitas lokal secara komparatif sebagai dasar peningkatan kinerja secara berkelanjutan.⁴⁶

1.6.5 Sosiologi Pendidikan: Pendidikan dan Hak Atas Kota Persimpangan antara Kebijakan Perkotaan, Pendidikan dan Kemiskinan

Dalam kajian ilmu sosiologi pendidikan terdapat pembahasan mengenai kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan kemiskinan dan perkotaan. Materi tersebut dikaji oleh Pauline Lipman yang berjudul Pendidikan dan Hak atas Kota Persimpangan antara Kebijakan Perkotaan, Pendidikan dan Kemiskinan. Menurut Pauline, kebijakan pendidikan tidak hanya dibentuk oleh neoliberal urbanisme. Neoliberal urbanisme merupakan paradigma politik dan ekonomi yang berlangsung untuk kepentingan akumulasi kapital, paradigma tersebut meliputi 1) Memperluas logika pasar ke seluruh penjuru bumi dan semua bidang kehidupan sosial, 2) Meliberalisasi perdagangan, 3) Menurunkan harga tenaga kerja, 4) Menggunakan finansialisasi sebagai prinsip strategi akumulasi modal.⁴⁷ Menurut Pauline, kebijakan

⁴⁶*Ibid*, hlm.4.

⁴⁷ Stephen J.Ball, dkk, *The Routledge International Handbook of the Sociology of Education*, (Newyork: Routledge Taylor & Francis Group, 2010), hlm.41.

pendidikan dapat dibentuk atau terbentuk dari peningkatan ketidaksetaraan (*unequality*) meliputi aspek ekonomi, sosial dan spasial sebagai ciri ekonomi global di perkotaan. Wilayah perkotaan merupakan ekspresi terkonsentrasi dari dinamika ketimpangan yang ekstrim, marginalisasi dan sentralitas yang juga menjadi ciri dari ekonomi global.

Adanya neoliberal urbanisme diantaranya menghasilkan perpindahan kekayaan secara besar-besaran ke kaum elit, konsentrasi berada di tangan para elit global, terjadinya peningkatan ketidaksetaraan ekonomi, dan geografi menjadi sentralitas serta terdapat marginalitas baru. Menurut Pauline terdapat beberapa ciri-ciri perkotaan khususnya di bagian utara dan selatan dunia. Ciri-ciri tersebut yakni meliputi 1) Urbanisasi yang semakin cepat, 2) Terjadinya peningkatan ketimpangan sosial, 3) Semakin meningkatnya jumlah masyarakat miskin di kota, 3) Informalisasi tenaga kerja dan perumahan, 4) Akulturasi dan identitas transnasional yang dihasilkan oleh migrasi tenaga kerja dan perpindahan petani, 5) Sistem pendidikan di kota cenderung pada ketidaksetaraan dalam penyediaan pendidikan. Menurut Pauline, ketidaksetaraan dalam pendidikan tersebut diantaranya pada akses layanan, hasil, budaya dan identitas yang dihargai.

Sekolah dipengaruhi oleh proses ekonomi politik dan kebijakan pendidikan, namun kebijakan pendidikan juga menjadi situs penting perlawanan. Salah satunya Gerald Grace yang menentang pendekatan Ilmu Kebijakan yang berlaku untuk studi masalah pendidikan perkotaan di AS dan Inggris. Grace juga menolak kritik Mills tentang Abstrak Empirisme. Pandangan Grace mengenai Beasiswa Kebijakan Kritis yakni menempatkan pendidikan perkotaan secara teoritis dan sosial dalam kerangka yang lebih besar dari konteks sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakat.

Dalam pandangan Grace, Beasiswa Kebijakan Kritis menjelaskan perjuangan materi dan budaya dimana sekolah berada dan merupakan tindakan sosial generatif menuju keadilan sosial. Kebijakan diartikan sebagai ekspresi dari nilai-nilai yang

muncul dari kepentingan tertentu dan hubungan kekuasaan.⁴⁸ Kajian Pauline pada Beasiswa Kebijakan Kritis yakni membawa beasiswa dalam studi perkotaan, geografi kritis, dan sosiologi perkotaan untuk menjelaskan peran pendidikan dalam restrukturasi ruang kota, material dan budaya dalam berbagai dimensi kekuasaan. Dalam kajian Pauline terdapat kaitan antara restrukturasi pendidikan di perkotaan bagi pembangunan perkotaan, yakni pendidikan dipandang sebagai sebuah ruang atau tempat untuk akumulasi modal. Seperti sekolah-sekolah yang ada di perkotaan dipandang dari segi akumulasi modal dan perbaikan spasial di perkotaan juga berguna untuk akumulasi modal.

Menurut Harvey, perbaikan spasial yakni lokasi fisik fasilitas produksi, lingkungan binaan kota dan tempat konsumsi dihancurkan dan dibangun kembali di tempat lain untuk membentuk jaringan lokasi baru untuk akumulasi modal.⁴⁹ Ketika adanya proses restrukturasi, maka di dalamnya ada kekuasaan yang direproduksi dan diperebutkan. Jadi, restrukturasi bertujuan untuk kepentingan akumulasi modal dengan menciptakan dan membangun jaringan-jaringan baru yang dapat mereproduksi kekuasaan dan kelas. Dalam kemunduran neoliberalisme yakni di awal tahun 1980, pemerintah federal AS mengalami kekurangan pendanaan yang kemudian diserahkan kepada pemerintah kota. Pemerintah kota mengatasi permasalahan tersebut dengan strategi kewirausahaan, salah satunya dari pajak *real estate*. Pembangunan *real estate* pada dasarnya beroperasi sebagai instrumen keuangan dan menghasilkan ketidaksetaraan spasial dapat dikenal dengan sebutan gentrifikasi. Gentrifikasi yakni kegiatan perpindahan pemukiman penduduk kelas ekonomi menengah atas ke pemukiman penduduk kelas menengah bawah yang wilayahnya diperbaharui. Gentrifikasi dapat dikenal dengan istilah pengusuran. Gentrifikasi dapat berdampak negatif bagi penduduk yang berpenghasilan rendah dan menyebabkan pengusiran ekonomi karena harga sewa dan pajak properti meningkat.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 243.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 243.

Peran sekolah umum disini adalah dapat memasarkan kota untuk menarik investor ke wilayah yang potensial. Selain itu, untuk memasarkan wilayah yang mengalami gentrifikasi kepada penduduk kelas menengah dan kelas atas baru.

Bagi kelas menengah, pendidikan dipandang sebagai arena pembentukan dan reproduksi kelas. Kota Chicago pada reformasi tahun 1995 memetakan pola lingkungan gentrifikasi dan pada temuannya sekolah kategori keterampilan dasar, militer dan kejuruan berada pada komunitas kulit berwarna yang berpenghasilan rendah. Namun, pemerintah Amerika Afrika dan Latin telah menutup sekolah bagi komunitas berpenghasilan rendah yang mengalami gentrifikasi dan menggantinya dengan Sekolah Charter. Sekolah Charter merupakan sekolah umum pilihan yang dipasarkan untuk komunitas kelas menengah dan atas.

Chicago menjadi contoh kota yang dapat ditiru selama tiga dekade terakhir dari sistem pendidikannya yakni penghapusan diferensiasi dan stratifikasi yang banyak terjadi di kota-kota di Amerika. Chicago memberikan menu insentif bagi kaum kelas atas yang digunakan untuk pengembangan perkebunan, kepentingan perusahaan, perbankan, privatisasi lembaga publik, pemasaran ke kelas menengah dan investor, serta peningkatan kepolisian dan pengawasan komunitas warna (selain kulit putih). Selain itu, pentingnya pendidikan untuk daya saing antar kota dapat diukur dengan keterlibatan elit perusahaan dan keuangan dalam kebijakan sekolah perkotaan. Chicago juga memberikan contoh yang dapat ditiru oleh kota lainnya adanya Klub Komersial Chicago (CCC) yaitu sebuah organisasi yang terdiri dari pimpinan perusahaan dan elit sipil terkemuka yang berperan dalam kebijakan sekolah.

1.6.6 Teori Struktural Fungsionalisme dalam Sosiologi Pendidikan

Dalam kajian sosiologi pendidikan, terdapat kajian teori struktural fungsionalisme yang mengkaji fenomena sosial di dalam ruang pendidikan. Teori struktural fungsionalisme merupakan paradigma yang memandang perubahan sosial

secara parallel yaitu bahwasanya sistem sosial (masyarakat) terdiri dari bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling terkait atau terintegrasi. Sederhananya, elemen-elemen ini memiliki fungsi yang dijalankannya masing-masing untuk mencapai sebuah keseimbangan kondisi sosial. Jika salah satu elemen tidak menjalankan fungsinya dengan baik maka akan terjadi disfungsi dalam sistem sosial tersebut.

Kajian sosiologi pendidikan pada teori struktural fungsionalisme yakni memfokuskan pada bagaimana struktural fungsionalisme memandang sistem yang ada di dalam ruang atau lembaga pendidikan. Ruang atau lembaga pendidikan disini dilihat sebagai sebuah sistem sosial yang di dalamnya memiliki struktur, pola-pola interaksi dan proses kegiatan yang dijalankan oleh aktor-aktor terkait untuk mencapai keseimbangan kondisi sosial, yaitu tujuan dari pendidikan tersebut. Teori struktural fungsionalisme memandang masyarakat sebagai sesuatu hal yang stabil dengan kecenderungan ke arah keseimbangan, dengan demikian tidak ada unsur sosial yang mampu berdiri sendiri sehingga antara satu unsur dengan unsur lainnya memiliki hubungan yang saling ketergantungan.⁵⁰ Sederhana nya, dalam lembaga pendidikan terdapat kebijakan-kebijakan pendidikan berupa program-program pendidikan yang dijalankan di sekolah-sekolah. Program tersebut tentunya memiliki struktur sosial yang terdiri dari bagian-bagian yang memiliki fungsinya masing-masing untuk dijalankan oleh agen atau aktor di dalam lembaga pendidikan tersebut.

Dalam kajian struktural fungsionalisme beberapa tokoh teori ini ada yang mengkaji dengan konsep sosialisasi, stratifikasi, interaksi, nilai dan norma maupun dinamika kelompok sosial. Namun, menggunakan pemikiran Talcott Parsons dan Durkheim dilandasi bahwa sistem sosial pada dasarnya berada pada keadaan keseimbangan (*equilibrium*) yakni ada tiga prinsip utama yang diuraikan oleh Parsons dan Durkheim. Prinsip tersebut diantaranya (1) Integritas, prinsip ini menunjukkan bahwa bagian-bagian dari sistem tidak berdiri sendiri, (2) Stabilitas, prinsip ini menekankan kepada keadaan yang stabil di dalam sistem sosial, (3) Konsensus,

⁵⁰ Rahmi Juwita, dkk, *Loc.cit*, hlm.5.

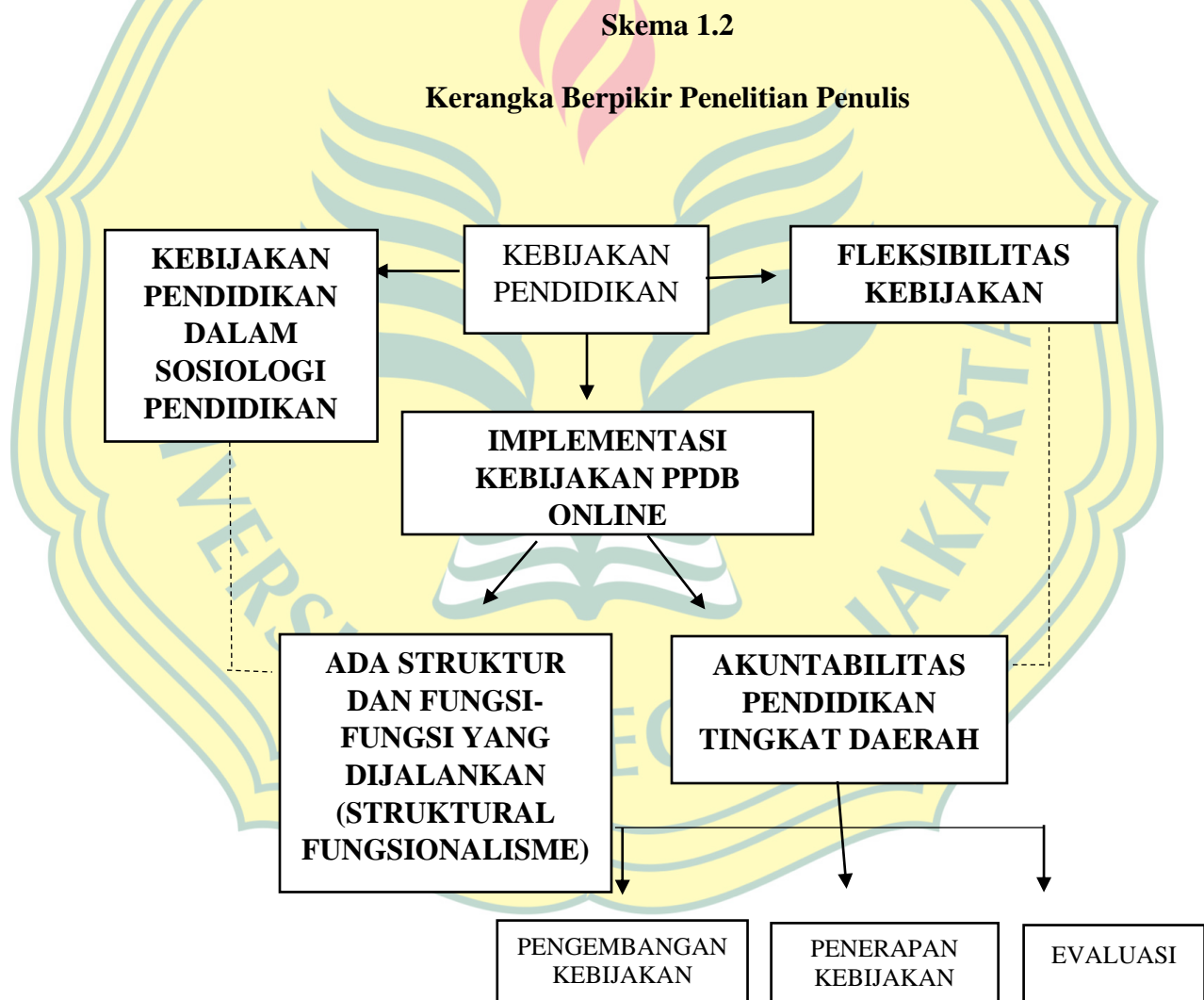
prinsip ini mengusahakan adanya kesepakatan atau kesesuaian paham dalam persepsi, sentimen-sentimen, nilai-nilai, dan keyakinan di dalam sistem.⁵¹ Parsons juga menjelaskan ketiga prinsip utama tersebut melalui dua fungsi utama dari sekolah yakni adanya proses sosialisasi dan proses seleksi. Proses sosialisasi dalam sekolah berfungsi untuk membentuk kesiapan dalam diri individu sebagai aktor dalam menjalankan status dan peranannya di dalam masyarakat. Sedangkan, proses seleksi dalam sekolah berfungsi untuk menyaring peserta didik yang memenuhi syarat tertentu untuk memegang status dan peran tertentu seperti pekerjaan dan jabatan, seperti tes seleksi masuk sekolah dan *interview* pekerjaan.

Teori ini juga memandang adanya kontribusi yang positif dari lembaga pendidikan dalam memelihara keberlangsungan sistem sosial. Terdapat pemikiran Durkheim yang dijabarkan dalam tiga kategori diantaranya: (1) Pendidikan dan solidaritas sosial yakni adanya transmisi nilai dan norma sosial dalam masyarakat, (2) Sekolah sebagai miniatur dalam masyarakat yaitu sekolah menyiapkan pengalaman untuk berinteraksi dengan masyarakat, (3) Pendidikan dan pembagian kerja yaitu pendidikan memiliki fungsi dalam memberikan keterampilan khusus untuk terjun dalam spesialisasi pekerjaan yang semakin kompleks. Terdapat juga pemikiran Talcott Parsons dijabarkan dalam tiga kategori diantaranya: (1) Pendidikan dan nilai universal yaitu sekolah mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai yang bersifat universal kepada peserta didik agar nantinya dapat diterima di masyarakat, (2) Pendidikan dan kesepakatan nilai yaitu pendidikan mengajarkan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat, (3) Pendidikan dan seleksi sosial. Inti dari teori struktural fungsionalisme yaitu memelihara dan mempertahankan adanya keseimbangan dalam sistem sosial yakni dengan menciptakan hubungan timbal balik (saling keterkaitan) antara struktur dengan tindakan aktor.

⁵¹ *Ibid*, hlm.6.

1.6.7 Kerangka Berpikir

Dalam melakukan sebuah penelitian, hendaknya dikerjakan dalam bentuk yang sistematis, supaya mudah dipahami dalam membaca hasil penelitian tersebut. Selain itu, sistematisnya penelitian juga berfungsi sebagai ilmiah atau tidaknya penelitian tersebut. Oleh karena itu, penulis memvisualisasikan kerangka berpikir penulisan seperti dibawah ini:



(Sumber: Diolah oleh Penulis, 2020)

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam PPDB *Online* di Tingkat SMA Negeri Tahun Pelajaran 2019/2020 di DKI Jakarta ini akan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi didalamnya dan tanpa ada pengujian hipotesis, dengan metode-metode yang alamiah berdasarkan fenomena yang diamati.⁵² Pendekatan kualitatif yang peneliti gunakan berkaitan dengan metode deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menjelaskan gambaran objek yang diteliti berdasarkan gejala dan keadaan yang ada atau sesuai fakta.⁵³

Penelitian kualitatif berfikir secara induktif (*grounded*), tidak memulai dengan sebuah teori untuk menguji atau membuktikan. Penelitian kualitatif tidak dimulai dengan mengajukan hipotesis dan kemudian menguji kebenaran (berfikir deduktif), melainkan bergerak dari bawah dengan mengumpulkan data sebanyak mungkin tentang sesuatu. Data yang telah didapat kemudian dicari pola-pola, hukum, prinsip-prinsip, dan akhirnya menarik kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan.

1.7.2 Subjek Penelitian

Dalam terselenggaranya penelitian kualitatif diperlukan adanya subjek penelitian. Subjek penelitian ini yaitu pihak-pihak yang terkait dalam adanya program maupun implementasi kebijakan pendidikan PPDB *Online*. Sehingga narasumber dalam penelitian ini terdapat 7 orang dari pihak Sekolah yang dikategorikan sebagai pendidik, siswa dan orang tua siswa dan 1 orang sebagai triangulasi data.

⁵²Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm 23.

⁵³*Ibid.*

Tabel I.3

Karakteristik Informan

No	Nama	Posisi	Peran dalam Penelitian
1	Nur Evi Rahmawati	Wakil Kepala Sekolah (bidang kesiswaan) SMAN 32 Jakarta	Memberikan informasi mengenai pelaksanaan PPDB <i>Online</i> secara rinci
2	Sucipto Ardi	Koordinator PPDB di SMAN 32 Jakarta	Memberikan informasi mengenai latar belakang, motif, tujuan, dampak, prosedur pelaksanaan PPDB <i>Online</i> di SMA Negeri 32
3	Andika Restu	Pendidik	Memberikan informasi mengenai dampak PPDB <i>Online</i> bagi pendidik, proses belajar dan citra sekolah
4	Fathian Mufid	Siswa	Memberikan informasi mengenai dampak PPDB <i>Online</i> bagi siswa
5	Angga Bagaskara	Siswa	Memberikan informasi mengenai dampak PPDB <i>Online</i> bagi siswa
6	Roni Pujianti	Orang Tua Siswa	Memberikan informasi tanggapan PPDB <i>Online</i> dan alur pendaftaran layanan PPDB <i>Online</i>
7	Shanti Hermawan	Orang Tua Siswa	Memberikan informasi tanggapan PPDB <i>Online</i> dan alur pendaftaran layanan PPDB <i>Online</i>
8	Satriwan Salim	Wakil Sekretaris Jendral Federasi Serikat Guru Seluruh Indonesia (FSGI)	Sebagai triangulasi data penulis

(Sumber: Diolah oleh Penulis, 2019)

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data**1.7.3.1 Wawancara Mendalam**

Wawancara memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari para informan dalam berbagai situasi dan konteks. Peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur dalam penelitian ini. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman

wawancara ini hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara mendalam jenis ini bersifat lentur dan terbuka, tidak terstruktur ketat tetapi dengan fokus pertanyaan yang semakin terfokus dan mengarah pada kedalaman informasi. Peneliti memberikan keleluasaan kepada informan untuk memberikan penjelasan secara aman sehingga informan tidak merasa tertekan. Peneliti mewawancarai mengenai implementasi pelaksanaan PPDB *Online* Zonasi terkait dengan penyetaraan kelas sosial yang ada di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).

1.7.3.2 Observasi

Penulis melakukan pengamatan secara langsung dengan cara mengamati implementasi program PPDB *Online* Zonasi di SMAN 32 Jakarta. Selain observasi, penulis melakukan pengamatan langsung terhadap siswa dan guru terhadap dampak dari implementasi program PPDB *Online* Zonasi tersebut di SMAN 32 Jakarta. Observasi dilakukan demi melihat langsung realita yang terdapat di lapangan dan mampu menganalisis penelitian berdasarkan wawancara dan juga hasil temuan berdasarkan pengamatan langsung.

1.7.3.3 Dokumentasi dan Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Peneliti mengambil segala macam bentuk data pendukung penelitian, berupa gambar, artikel, data keanggotaan, hasil rekaman dan fieldnote. Hal ini dilakukan untuk menjadi data pendukung laporan penelitian selain hasil wawancara dengan penyelenggara dan pelaksana PPDB *Online*. Dokumentasi dalam penelitian ini yang berhubungan dengan penelitian seperti struktur organisasi, gambaran umum, program kegiatan, jaringan yang terjalin, serta berbagai aktivitas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang diperkaya dengan studi literatur yang ekstensif. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari informan baik yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi yang sudah dilakukan dalam catatan lapangan maupun dari dokumen yang sudah ada, akan dianalisis oleh penulis dengan cara diinterpretasi ke dalam suatu abstraksi dan kerangka pemikiran tertentu. Hasil wawancara dan observasi merupakan data primer yang akan dianalisa dan didukung oleh data sekunder yang berasal dari buku. Analisa dilakukan dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan pendidikan serta konsep-konsep yang sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan.

1.7.5 Triangulasi Data

Creswell menjelaskan bahwa konsep triangulasi didasarkan pada asumsi bahwa setiap yang ada dalam sumber data, penelitian, dan metode akan di netralisir ketika digunakan bersama sumber data, penelitian, dan metode yang lain.⁵⁴ Triangulasi data dimaksudkan untuk dapat memahami kebenaran data penelitian yang dilihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Untuk mengkroscek data, peneliti melakukan wawancara mendalam kepada Pakar Pendidikan, Bapak Satriwan Salim selaku Wakil Sekretaris Jendral Federasi Serikat Guru Seluruh Indonesia (FSGI).

Teknik Triangulasi dalam penelitian ini dengan jenis data dan informasi yang dibutuhkan dari hasil penelitian yang telah dipenuhi. Setelah itu peneliti melakukan pengecekan terhadap data-data yang telah di peroleh apakah valid atau tidak. Dalam penelitian ini triangulasi penelitian dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumen yang terdapat pada Implementasi Program PPDB *Online* di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) maupun pada pihak perencana dan pembuat program PPDB *Online*.

⁵⁴Usman Hunaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm 162.

1.7.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari tiga bagian yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Ketiga bagian ini disajikan dalam lima bab dan beberapa subbab. Bab I dalam penelitian ini yaitu berisi pendahuluan yang menjabarkan latar belakang penelitian sehingga dapat terlihat permasalahan penelitian yang muncul. Pada permasalahan penelitian diuraikan dua pertanyaan besar yang menjadi fokus penulis dalam penelitian. Selanjutnya terdapat juga tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan penelitian sejenis, kerangka konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

Bab II dalam penelitian ini berisi tentang gambaran umum program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Online* dan Sekolah yang diteliti. Bab II dalam penelitian ini diberi judul Tinjauan Umum Program PPDB *Online*. Pada subbab pertama terdapat tinjauan umum program PPDB *Online* yang berisi konsep Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Online*, visi dan misi program, manfaat dan keuntungan program, kategorisasi jalur program, alur pendaftaran, serta faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan program. Dalam subbab kedua terdapat Gambaran Umum SMA Negeri 32 Jakarta yaitu profil, visi dan misi, struktur organisasi dan SDM sekolah SMA Negeri 32 Jakarta.

Bab III mendeskripsikan temuan penelitian yang diberi judul Implementasi Program PPDB *Online* di SMA Negeri 32 Jakarta. Pada sub bab pertama akan menjelaskan gambaran umum pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Online* di SMA Negeri 32 Jakarta. Kemudian di sub bab kedua akan menjelaskan mengenai Faktor Penunjang dan Penghambat dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Online* di SMA Negeri 32 Jakarta. Sub bab ketiga menjelaskan mengenai Kontribusi Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Online* dalam Pemerataan Persebaran Peserta Didik di SMA Negeri 32 Jakarta. Selanjutnya pada

sub bab keempat akan menjelaskan Kebijakan Pendidikan dalam Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Online* Tahun Pelajaran 2019/2020 di SMA Negeri 32 Jakarta pada Peraturan Pemerintah. Sub bab kelima menjelaskan Dampak Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Online* bagi SMA Negeri 32 Jakarta.

Bab IV akan menganalisis hasil penelitian berdasarkan temuan di lapangan yang diberi judul Akuntabilitas Pendidikan pada Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Online* di SMA Negeri 32 Jakarta. Penulis akan menggunakan konsep Akuntabilitas Pendidikan. Terdapat juga bagian Diskursus Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Online* dalam Sosiologi Pendidikan. Penelitian ini akan diakhiri oleh bab V sebagai penutup. Penulis akan memberikan kesimpulan dari penelitian dan memberikan saran.

